

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan upaya mencapai tujuan nasional seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan merupakan proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sekarang. Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan harus merata diseluruh wilayah Indonesia baik di desa maupun di kota dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

Sebagaimana diamanatkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pengutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan tahun 2015-2019, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.(dalam RPJMN : 2)

Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di wilayah pedesaan, maka pemerintah memberikan prioritas dan perhatian khusus bagi pembangunan desa. Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kegiatan

masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan swadaya gotong royong di bawah bimbingan dan bantuan aparaturn pemerintah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi Sumber Daya Manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek dan subjek pembangunan. Dikatakan sebagai obyek pembangunan karena sebgai penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan dipedesaan maupun pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Dalam proses pembangunan, selain kemajuan secara fisik juga diutamakan adanya perubahan sikap mental masyarakat agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak akan tercapai apabila masyarakat tidak terbuka untuk menerima ide-ide baru secara aktif. Dengan demikian pembangunan idealnya harus melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan desa yang secara langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, faktor-faktor lain yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan juga harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah partisipasi, SDM, biaya, informasi, logistik, dan kewenangan dasar hukum.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi perasaan serta perilaku orang lain. Dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang memikul tanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa yang baik akan memberikan pengaruh yang positif bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan. Apabila kepala desa memberikan contoh dan teladan yang baik, maka secara otomatis masyarakat akan mengikutinya. Semangat gotong royong yang melekat pada bangsa Indonesia merupakan modal berharga dalam pembangunan, sehingga setiap kepala desa harus dapat memberdayakan semangat gotong royong tersebut dalam wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kepala Desa sebagai pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang demoratis dengan menstimulasi para perangkat desa serta masyarakat agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Untuk merespon

hal-hal demi terciptanya keberhasilan pembangunan, maka dituntut peran serta aktif dari segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan kondisi di desa Karangpatihan sudah mulai menampakkan kemajuan setelah dipimpin oleh Bapak Eko Mulyadi selama periode 2013-2019 contohnya pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat yang semakin meningkat dibuktikan dengan adanya pemberdayaan ikan lele dan kerajian-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat desa Karangpatihan. Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kepemimpinan yang demokratis sehingga mampu memajukan desa yang dulunya kurang berkembang menjadi lebih maju.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ Peran Kepemimpinan demokratis Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diungkapkan melalui penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepemimpinan Demokratis Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tahun 2015 ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan demokratis terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pembendaharaan penelitian dalam bidang kajian pemerintahan, khususnya dalam karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan khasanah ilmu.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
  - c. Sebagai pengembang disiplin ilmu kearah berbagai spesifikasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kepala Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan sehingga dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan peranannya terhadap tingkat partisipasi dalam pembangunan masyarakat desa .
  - b. Bagi pejabat Pemerintahan Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta yang berguna untuk kedepan

- c. Bagi peneliti, sebagai syarat tugas akhir sekaligus menambah wawasan berfikir dan pengalaman dalam pemerintahan desa